



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2022



BPKPAD

KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2022 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di BPKPAD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja BPKPAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Temanggung, Februari 2023

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG


TRI WINARNO, SE, MM u
Pembina Tk. I
NIP 19731020199903100

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	3
4. Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana Pendukung.....	7
5. Isu Strategis BPKPAD.....	9
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP.....	10
1. Dasar Hukum.....	10
2. Tujuan LKJIP	10
3. Manfaat LKJIP	11
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS.....	13
1. Visi.....	13
2. Misi.....	14
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah....	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
C. <i>CASCADING</i> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	21
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
1. Capaian Kinerja Utama BPKPAD.....	28
2. Capaian Kinerja Sasaran Dan Indikator Program.....	35
B. AKUTANBILITAS KEUANGAN.....	42
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	44
BAB IV PENUTUP	47
A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA.....	47
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 2	Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung	9
Gambar III. 1	Foto sosialisasi pajak di Desa Giling sari	34
Gambar III. 2	Foto Sosialisasi dan pelayanan pajak di kantor	34
Gambar III. 3	Sosialisasi pajak di desa Selopampang	34
Gambar III. 4	OPINI WTP TAHUN 2019	45
Gambar III. 5	OPINI WTP TAHUN 2020	45
Gambar III. 6	OPINI WTP TAHUN 2021	46
Gambar III. 7	Penghargaan WTP 10 tahun berturut - turut (2012-2021) ..	46

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPKPAD Kabupaten Temanggung	7
Tabel I. 2	Jumlah Supporting Staf di BPKPAD Kabupaten Temanggung	8
Tabel I. 3	Tabel sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	9
Tabel II. 1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Bpkpad Kabupaten Temanggung	16
Tabel II. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD	17
Tabel II. 3	Program dan Kegiatan.....	17
Tabel II. 4	Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kab. Temanggung	22
Tabel II. 5	Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2022.....	25
Tabel II. 6	Anggaran per Sasaran Tahun 2022	25
Tabel II. 7	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2022	26
Tabel II. 8	Kinerja dan Capaian Kinerja Program 2022	26
Tabel III. 1	Skala Pengukuran Kinerja LKjIP.....	29
Tabel III. 2	Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2022	30
Tabel III. 3	PROGRAM dan KEGIATAN TA 2022.....	33
Tabel III. 4	Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022	35
Tabel III. 5	Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Thn 2022	38
Tabel III. 6	Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pajak Daerah Thn 2022	39
Tabel III. 7	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	42
Tabel III. 8	Capaian indikator program dari sisi anggaran.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset

daerah.

6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Invenstasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sukoordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- e. Bidang Penganggaran, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan.

4. Bidang Penagihan dan Pengendalian Bidang Penagihan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah.

5. Bidang Penganggaran

Mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan.

7. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional

Mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

4. Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	0	
	B. SMP	1	
	C. SMA	8	
	D. Sarjana Muda (D-III)	27	
	E. S-1 dan D-IV	20	
	F. S-2	12	
	Jumlah	68	
2	Pangkat/Golongan		
	A. Gol I	0	
	B. Gol II	27	
	C. Gol III	32	
	D. Gol IV	9	
	Jumlah	68	
3	Jabatan		
	A. Eselon II	1	
	B. Eselon III	7	

	C.	Eselon IV	13	
	D.	Eselon V	0	
	E.	Jabatan Fungsional Khusus	9	
	F.	Jabatan Fungsional Umum	38	
Jumlah			68	

Dukungan *Supporting Staf* di BPKPAD sebanyak 28 (dua puluh delapan) personil seperti pada tabel berikut ini:

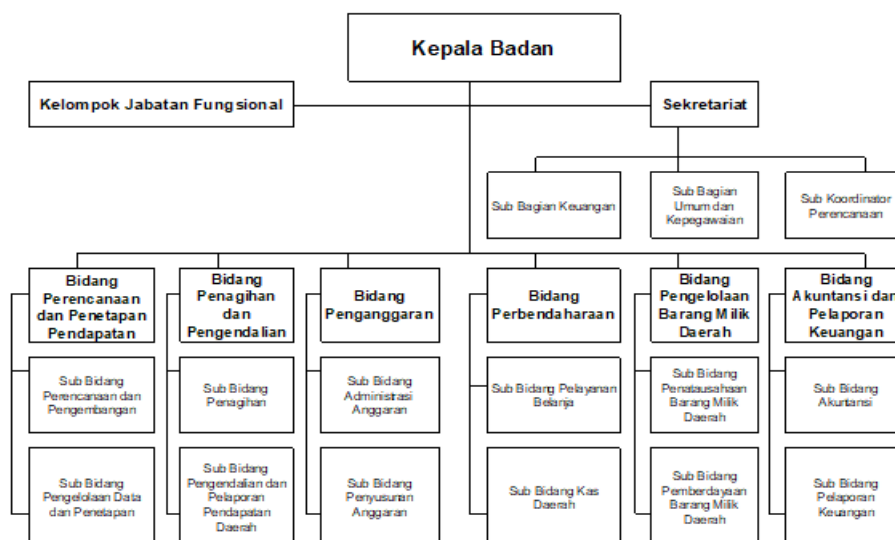
Tabel I. 2

Jumlah Supporting Staf di BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH SS	KET.
1	2		3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:			
	Kualisasi Pendidikan			
	A.	SD	1	
	B.	SMP	4	
	C.	SMA	8	
	D.	Sarjana Muda (D-III)	5	
	E.	S-1 dan D-IV	9	
	F.	S-2	1	
Jumlah			28	
2	Jabatan			
	A.	Staf Pendukung	14	
	B.	Tenaga Keamanan	6	
	C.	Tenaga Kebersihan	8	
Jumlah			28	

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar I. 1
Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung



Sumber data ; Sekretariat 2023

b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BPKPAD sebagai berikut:

Tabel I. 3
Tabel sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	7.862	M2	Hak pakai
b.	Gedung	3	gedung	Kondisi baik
c.	Alat-alat angkutan	95	buah	Kondisi baik
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:	827	buah	Kondisi baik
	➤ Alat Kantor	308		
	➤ Komputer	86		
	➤ Meja dan Kursi Kerja	85		
	➤ Alat Rumah Tangga	236		
	➤ Aplikasi	17		

5. Isu Strategis BPKPAD

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, menghadapi beberapa isu-isu strategis. Dalam penentuan isu-isu

strategis dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor penentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II diatas yaitu adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor external (peluang dan ancaman).

Dari faktor-faktor tersebut dapat ditentukan bahwa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial,
2. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja,
3. Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah,

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Pera Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2923;

5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di bidang keuangan, □serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap kinerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung;

- b. Sebagai dokumen acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan yang berisi informasi terkait SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan; dan
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi

daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tataruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1)Kecepatan,
- 2)Ketepatan,
- 3)Keramahan, dan
- 4)Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2019-2023 visi BPKPAD adalah:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.”

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tabel II. 1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Bpkpad Kabupaten Temanggung

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM				
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di BPKPAD Kabupaten Temanggung, maka BPKPAD Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<p>Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Sasaran :</p>		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1.1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan
		1.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama BPKPAD Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG	1	Administrasi	1	Gaji dan tunjangan ASN

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Keuangan		
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		
					Bangunan Lainnya		
				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	16	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
				17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
				18	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
				19	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
				20	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
				7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	21	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
						22	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
						23	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
				8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan		

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
			Keuangan Daerah		LO dan Beban			
				24	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
				25	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
				26	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
			9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	27	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
					28	Pengelolaan Dana darurat dan mendesak		
					29	Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota		
			III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	Penyusunan Standar Harga
							31	Penatausahaan Barang Milik Daerah
32	Pengamanan Barang Milik Daerah							

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
				33	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				34	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	35	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				36	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				37	Penagihan Pajak Daerah
				38	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

C. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2022 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan

APBD TA 2022. BPKPAD Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II. 4

Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	TAR GET 2022
1.	KEPALA	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	nilai	79,4
2	SEKTRETARIS	Terselenggaranya Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya pengelolaan Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	100	%
3	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak	0,96	%
			Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	%
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%
4	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90	%
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%
5	KABID ANGGARAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja	90	%

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	TAR GET 2022
			dalam APBD		
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%
6	KABID PERBENDAHARAAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100	%
7	KABID BMD	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	86,3 1	%
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,9 0	%
8	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi belanja terhadap APBD	93	%
			Cakupan laporan keuangan daerah yang akuntabel	90	%
			Opini BPK atas LKPD	WTP	%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPKPAD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022

berjumlah Rp 443.291.917.130 dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

Tabel II. 5
Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	KEUANGAN	443.291.917.130
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.634.899.874
	Administrasi keuangan daerah	13.402.521.849
	Adminstrasi umum Perangkat Daerah	138.499.500
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	672.899.714
	Pengadaan BMD Penunjang uruasan Pemda	208.371.700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	2.212.607.111
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	422.323.793.556
	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	580.025.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	502.875.600
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	850.656.960
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	420.390.235.996
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.088.268.500
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.244.955.200

Tabel II. 6
Anggaran per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022		
		(Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	38.283.983.160	21.414.697.000 .672	443.291.917.130

Terjadinya perbedaan besaran anggaran antara Renja dan APBD, Karena pada renja 2022 tidak dimasukkan kegiatan Penunjang Urusan

Kewenangan Pengelolaan (Belanja tak terduga, Belanja bagi hasil dan Belanja bantuan keuangan) sebesar Rp 420.390.235.996,- sehingga anggaran penunjang indikator sasaran BPKPAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 22.901.681.134,-

Indikator sasaran yang menunjang sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel II. 7
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2022

No	Bidang / Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15 %
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,4

Adapun program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung ada 4 program dengan 14 indikator sebagai berikut:

Tabel II. 8
Kinerja dan Capaian Kinerja Program 2022

No	Bidang / Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja 2022
1.	Meningkatnya pengelolaan Keuangan daerah	1	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100 %
		2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	90 %
		3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100 %
		4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100 %
		5	Persentase realisasi keuangan	93 %
		6	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90 %

No	Bidang / Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja 2022
		7	Opini BPK atas LKPD	WTP
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel	86,31 %
		9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,90 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,96 %
		11	Persentase terverifikasinya perubahan data	100 %
		12	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100 %
		13	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95%
		14	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun ke empat dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Utama BPKPAD

Untuk melihat keberhasilan dari tujuan dan sasaran pada RPJMD menggunakan suatu ukuran yang disebut Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari kebijakan yang ada. Indikator Kinerja Utama menjadi bagian dari tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan capaian target Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III. 1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	80 - 90	Memuaskan
3	BB	70 - 80	Sangat Baik
4	B	60 - 70	Baik
5	CC	50 - 60	Cukup
6	C	30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

a. Sasaran strategis : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

Capaian Sasaran Strategis BPKPAD berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebesar 89.46 % atau tergolong **MEMUASKAN** dengan hasil sebagai berikut:

Tabel III. 2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas										
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas										
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel										
No	Iku	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	6	9	10
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	100	15	16.69	100	15	16.69	100	100
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	nilai	69.52	79,4	62.74	78.92	79,5	62.74	78.92	78.92
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama			84.76			89.46				89.46

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator I : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dari target 15 %, realisasi 16.69 % atau capaian 100 % terhadap target akhir RPJMD 2023.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ada peningkatan kinerja pada indikator Presentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan. Hal ini karena beberapa strategi yang dilaksanakan BPKPAD antara lain:

- sosialisasi Kepada masyarakat dan peran aktif dari para petugas pajak

- Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah terutama pajak katering dan restoran.
- Untuk PBB-2 adanya pengurangan denda keterlambatan sehingga target dapat dipenuhi.

Faktor penghambat pada capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara real time membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat.

2. Indikator II : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

- a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan; untuk urusan kesehatan di luar gaji; belanja untuk infrastruktur) dari penerimaan dana transfer umum; dan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.
- d. Penyerapan anggaran
- e. Kondisi Keuangan Daerah
Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.
- f. Opini BPK
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2016 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten

Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Capaian Kinerja IPKD tahun 2022 dengan target nilai 79,3 mendapatkan angka 62.74 dengan capaian 78.92 % terhadap target akhir RPJMD 2023.

- Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator IPKD disebabkan karena kurangnya koordinasi antara Bappeda, Dinkominfo dan BPKPAD sebagai penyaji data di aplikasi IPKD Kemendagri terutama saat unggah data dukung, sehingga tidak memenuhi dimensi ketepatan waktu dengan nilai 0.

Adapun indikator IPKD pada tahun 2022 menurun dari status baik di tahun 2021 menjadi Perlu Perbaikan karena nilai dimensi 3 yakni ketepatan waktu = 0

- Faktor Pendukungnya Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>. Hasil perhitungan menunggu dari aplikasi tersebut.
- Strategi yang dilakukan dalam pengisian aplikasi IPKD dari Kemendagri dengan koordinasi lebih baik antara Dinkominfo, Bappeda dan BPKPAD sehingga kesalahan pengisian tidak akan terjadi di tahun yang akan datang.

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 22.901.681.134,- dengan realisasi Rp 19.282.816.447,- (84,20%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 3.618.864.687,- atau 15,8%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 5,26% karena capaian kinerja sebesar 89,46% sedangkan realisasi anggaran 84,20% .

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan *zoom meeting* dll

2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

Sasaran ini didukung oleh 4 program dan 11 kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel III. 3
PROGRAM dan KEGIATAN TA 2022

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di BPKPAD Kabupaten Temanggung

Gambar III. 1
Foto sosialisasi pajak di Desa Gilingsari



Gambar III. 2
Foto Sosialisasi dan pelayanan pajak di kantor



Gambar III. 3
Sosialisasi pajak di desa Selopampang



2. Capaian Kinerja Sasaran Dan Indikator Program.

Program yang dilaksanakan oleh BPKPAD pada tahun 2022 sejumlah 4 (empat) Program dengan 14 (empat belas) Indikator program, dengan 10 (sepuluh) indikator yang telah tercapai dan 3 (tiga) indikator akan tercapai dan 1 (satu) upaya keras sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Program 1 : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel III. 4
Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		Sat	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023			
						Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	1	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	99,77	100	99,73	99,73	100	99,73	99,73	99,73
		2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100,00	89,96	100,00	100	89,96	100,00	100	100
		3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100,00	100	42,86	42,86	100	42,86	42,86	42,86
		4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100,00	100	100,00	100	100	100,00	100	100
		5	Persentase realisasi keuangan	%	89,00	93	87,61	94,20	93	87,61	94,20	94,20
		6	Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	89,13	90	95,65	100	90	95,65	100	100
		7	Opini BPK atas LKPD	%	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	100
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM						7	90,97		7	90,97	90,97	

Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai 7 indikator dengan capaian 4 telah tercapai, 2 akan tercapai dan 1 upaya keras dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator yang telah tercapai sebagai berikut :

- Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 sama dan telah tercapai 100 % karena:
 - Faktor pendorong karena ketersediaan anggaran yang berasal dari berbagai sumber.
 - Faktor Penghambat karena sudah tercapai.
 - Strategi yang digunakan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persentase penerbitan SP2D *online* yang tepat waktu, pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 sama dan telah tercapai 100 % karena:
 - Faktor pendorong kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM
 - Faktor penghambatnya SKPD tidak merespon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak mengkonfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPKPAD
 - Strategi yang digunakan adalah koordinasi dengan SKPD lebih diintensifkan.
- Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel dan Opini BPK atas LKPD telah tercapai 100 %. Pada tahun 2022 meningkat dari target 90 % ercapai 95.65 %. Dibanding tahun 2021 capaian 89.13 % di tahun 2022 meningkat karena:
 - Faktor Pendorong adanya target kinerja.
 - Faktor Penghambatnya sumber Daya Manusia pendukung di OPD ada yang kurang kompeten.
 - Strategi yang digunakan mendorong Perangkat Daerah segera melaksanakan target kinerja.

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Keuangan yang **akan tercapai** adalah :

- Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,73 %. Dibanding tahun 2021 (99.77 %) menurun dikarenakan :
 - Faktor Penghambat karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran dan kegiatan.

- Faktor pendorong karena penggunaan Aplikasi SIPD
- Strategi yang dilakukan mendorong OPD untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persentase realisasi keuangan tercapai 87.61% dari target 93 %. Dibanding tahun 2021 (89 %) terjadi penurunan karena :
 - Faktor Penghambat : Persentasenya menurun dibandingkan tahun lalu karena realisasi dari Belanja BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masih dalam proses rekonsiliasi dan belum di sahkan melalui BUD.
 - Faktor pendorong adanya target kinerja.
 - Strategi yang akan dilakukan kedepan, Pemda mendorong OPD untuk mencermati antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Keuangan dengan status **upaya keras** ada 1 (satu) yaitu :

- Persentase dokumen penganggaran tepat waktu tercapai 42,86 % dari target 100 %. Dibanding tahun 2021 (100 %) terjadi penurunan yang sangat signifikan karena:
 - Faktor Penghambat : Keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung.
 - Faktor pendorong : Sudah terjadwalnya tahapan penyusunan yang terinci sesuai ketentuan Kemendagri.
 - Strategi yang dilakukan BPKPAD dengan mendorong OPD untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rata-rata Capaian Kinerja program Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 90,97 % dengan Predikat **AA** dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

b. Program 2 : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel III. 5
Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Thn 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023				
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	84,52	86,31	100,00	100	100,00		100	100
		2	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	78,83	98,9	88,21	89,19	88,21		89,19	89
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM						2	94,5			2	94,5	

Program Pengelolaan Barang Milik daerah mempunyai 2 indikator kinerja program sebagai berikut :

- Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja telah tercapai 100 % .Dibanding capaian tahun 2021 (84,52%) terjadi peningkatan karena:
 - Faktor Pendorong menggunakan Aplikasi SIMBADA
 - Faktor penghambat Sumber Daya Manusia di SKPD
 - Strategi yang dilaksanakan melakukan koordinasi dengan SKPD lebih intensif.
- Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, status akan tercapai dengan capaian dari target 98,9 % tercapai 88.21 %. Dibanding tahun 2021 (78.83 %) terjadi peningkatan kinerja disebabkan :
 - Faktor Penghambat : Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan.
 - Faktor pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan.

- Strategi yang dilakukan Meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah.

Rata-rata Capaian Kinerja program Pengelolaan Barang Milik daerah, berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 94.5 % dengan Predikat **AA** dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

c. Program 3 : Program Pengelolaan Pajak Daerah

Tabel III. 6

Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pajak Daerah Thn 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023			
						Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,70	0,96	1,94	100	1,27	1,94	100	100
		2	Persentase terverifikasi ya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		3	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	103,54	90	96,35	100	95	96,35	100	100
		5	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	95	100	100	95	100	100	100
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM						5	100		5		100	

Dari tabel di atas bisa dijelaskan sebagai bahwa Program pengelolaan Pajak daerah mempunyai 5 indikator dengan penjelasan sebagai berikut :

- Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak telah tercapai 1,94 % dari target 0,96 %. Dibanding tahun 2021 (0,70 %) terjadi peningkatan karena :

- Faktor pendorong karena pelaksanaan kegiatan pendataan Objek Baru untuk 9 jenis pajak baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran dari subjek pajak atas kesadaran sendiri.
 - Faktor Penghambat belum semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran sendiri untuk mendaftarkan objeknya, sedangkan petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas.
 - Strategi yang digunakan Peningkatan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru.
- Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu tercapai 100 % dikarenakan :
 - Faktor Pendorong tersedianya system aplikasi *open tax* dan eBPHTB sebagai alat untuk verifikasi data dengan beberapa instrumen pendukung seperti referensi dan informasi dari berbagai media.
 - Faktor penghambat :ntuk PBB-P2 tergantung masih bergantung pada peran aktif wajib pajak dan perangkat desa, sedangkan untuk BPHTB masih bergantung pada peran PPAT/PPATS.
 - Strategi yang dilakukan meningkatkan sosialisasi dan edukasi.
 - Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu tercapai 100 % ,sama seperti tahun 2021 karena :
 - Faktor pendorong tercapainya target karena tersedianya system aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame, dan meningkatnya kesadaran WP badan (vendor) reklame.
 - Faktor Penghambat masih ditemukan perbedaan antara izin dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame.
 - Strategi yang digunakan adalah koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui

reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.

- Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah di tahun 2022 dari target 90 % terealisasi 96,35 % atau capaian 100 % sama dengan tahun 2021 karena :
 - Faktor pendorong : kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi serta tren triwulan IV yang merupakan waktu dengan load transaksi tertinggi dibandingkan triwulan lainnya membuat kami optimis mampu mencapai target pendapatan daerah.
 - Faktor penghambat belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara real time membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat.
 - Strategi yang digunakan dengan membuat aplikasi yang bisa digunakan membantu menyajikan laporan pendapatan daerah.
- Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu tahun 2022 sama dengan tahun 2021 telah tercapai 100 % karena :
 - Faktor pendorong tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung suksesnya indikator ini.
 - Faktor penghambat : pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringkali terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu
 - Strategi yang dilakukan dengan koordinasi dan selalu mengingatkan kepada perangkat daerah tentang pentingnya melaporkan pendapatan yang sudah diperoleh tiap awal bulan, baik ketika ada rakor pimpinan maupun ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

Rata-rata Capaian Kinerja program Pengelolaan Pajak Daerah, berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100 % dengan Predikat **AA** dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tabel III. 7
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	BELANJA /kegiatan	22.901.681.134	19.282.816.447	3.618.864.687	84,20%
2	BELANJA OPERASI	20.416.599.823	16.821.948.336	3.594.651.487	82,39%
	Belanja Pegawai	14.312.066.849	12.909.854.321	1.402.212.528	90,20%
	Belanja Barang dan Jasa	6.104.532.974	3.912.094.015	2.192.438.959	64,09%
3	BELANJA MODAL	2.485.081.311	2.460.868.111	24.213.200	99,03%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.274.200	475.061.000	24.213.200	95,15%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.985.807.111	1.985.807.111	-	100,00%
4	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	-	2.000.000.000	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	-	2.000.000.000	0,00%
5	BELANJA TRANSFER	418.390.235.996	170.092.749.858	248.297.486.138	40,65%
	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000	7.936.684.862	14.315.138	99,82%
	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996	162.156.064.996	248.283.171.000	39,51%
	Belanja tak terduga dan Transfer	420.390.235.996	170.092.749.858	250.297.486.138	40,46%
	total belanja daerah	443.291.917.130	189.375.566.305	253.916.350.825	42,72%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk total belanja sebesar Rp 189.375.566.305,- dari total anggaran Rp 443.291.917.130,- atau 42,72% dari anggaran. Hal ini dikarenakan tidak ada realisasi Belanja tak terduga/ penyerapan 0 % dan belanja bantuan keuangan terserap 39,51 %. Belanja tak terduga dan belanja transfer tidak bisa diukur, maka anggarannya bukan menjadi pendukung indikator sasaran. Sehingga capaian anggaran untuk Program dan kegiatan BPKPAD 84,20 % dengan total belanja Rp 19.282.816.447,- dari anggaran sebesar Rp. 22.901.681.134,- dengan Predikat A Interpretasi **MEMUASKAN**

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini :

Tabel III. 8
Capaian indikator program dari sisi anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.933.557.560	1.242.781.379	64,27	BAIK
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.088.268.500	1.892.064.368	61,27%	BAIK
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.244.955.200	1.086.661.276	87,29%	MEMUASKAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.634.899.874	15.061.309.424	90,54%	SANGAT MEMUASKAN
jumlah	22.901.681.134	19.282.816.447	84,20 %	MEMUASKAN

Sumber LRA dan IKPD BPKPAD 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 84,20 %. Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 22.901.681.134,- dengan realisasi Rp 19.282.816.44,- (84,20%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 3.618.864.687,- atau 15,8%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar

5,26% karena capaian kinerja sebesar 89,46% sedangkan realisasi anggaran 84,20% dengan intepretasi **MEMUASKAN**.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Keuangan

Daerah. Pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 1.933.557.560,- dengan realisasi Rp 1.242.781.379,- **(64,27%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 690.776.181,- atau 35,73 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 26.7 % karena capaian kinerja di Program Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 90.97 % sedangkan realisasi anggaran 64.27% dengan intepretasi **BAIK**.

b. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah. Pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 3.088.268.500,- dengan realisasi Rp 1.892.064.368,- **(61,27 %)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.196.204.132,- atau 38,73 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 33.23 % karena capaian kinerja sebesar 94.5 % sedangkan realisasi anggaran 61.27 % dengan intepretasi **BAIK**

c. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Pajak Daerah

pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 1.244.955.200,- dengan realisasi Rp 1.086.661.276,- **(87,29 %)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 158.293.924,- atau 12,71 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 9.46 % karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 90.54% dengan intepretasi **MEMUASKAN** .

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan opini WTP ke 10 yang diterima pada bulan Mei 2022 sehingga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Opini Laporan keuangan Tahun anggaran 2022 akan diumumkan sekitar bulan April /Mei di tahun 2023.

Gambar III. 4
OPINI WTP TAHUN 2019

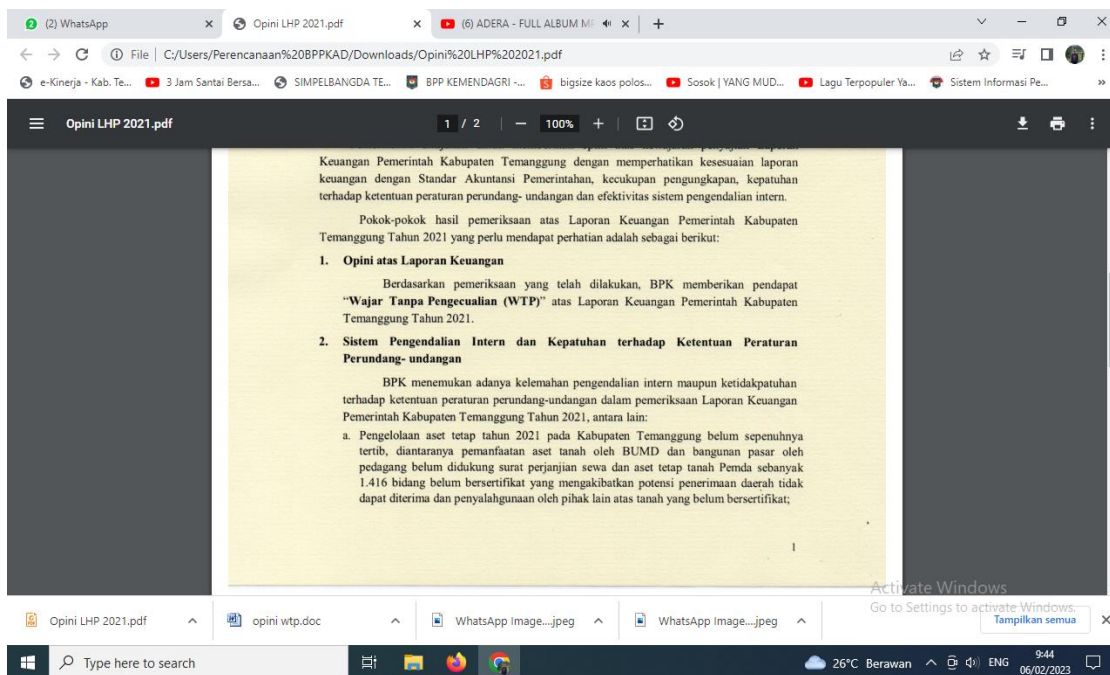


Gambar III. 5
OPINI WTP TAHUN 2020



Gambar III. 6

OPINI WTP TAHUN 2021



Gambar III. 7

Penghargaan WTP 10 tahun berturut - turut (2012-2021)



BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum BPKPAD Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sesuai Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2029 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator sasaran tercapai 89.46 % dikategorikan **MEMUASKAN**. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 indikator sasaran dan capaian program dengan 14 (empat belas) indikator program dikategorikan **SANGAT MEMUASKAN** (94,70%)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan

melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPKPAD dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**MEMUASKAN**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp. 308.726.486.721 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 305.939.643.656,- dengan pencapaian sebanyak 100, %.

Faktor pendorong tercapainya target :

- Pendapatan di BBHTP meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa
 - Sosialiasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.
- b. Realisasi belanja Penatausahaan SKPD sebanyak Rp 19.282.816.447,- terhadap anggaran SKPD sebanyak Rp. 22.901.681.134,- atau 84,20 % dalam 1 (satu) tahun dikarenakan efisiensi anggaran.
 - c. Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator IPKD karena kurang koordinasi antara Bappeda, Dinkominfo dan BPKPAD sebagai penyaji data di aplikasi IPKD Kemendagri terutama saat unggah data dukung, sehingga tidak memenuhi dimensi ketepatan waktu dengan nilai 0.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di masa mendatang antara lain ;

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan

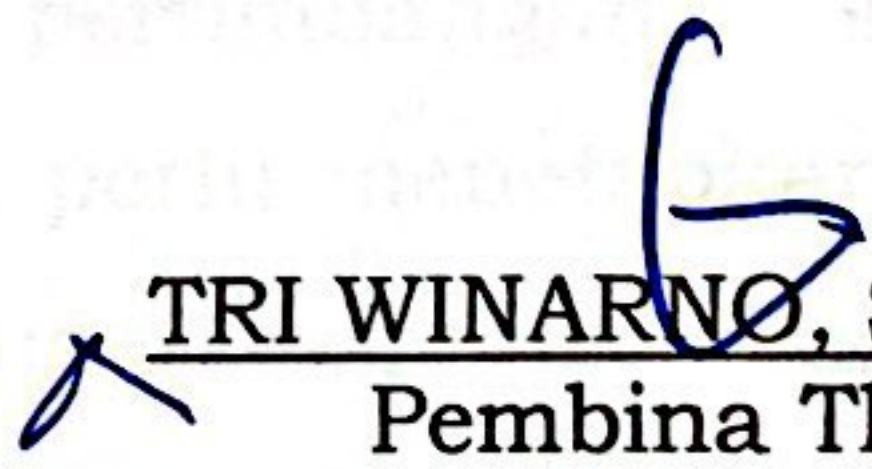
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2023

KEPALA BPKPAD


TRI WINARNO, SE, MM &
Pembina Tk. I
NIP 19731020 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung

Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178, 493702

e-mail : bppkad-tmg@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 051.2/ 35 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022
DAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BPKPAD TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan diinstruksikan kepada Bupati untuk membuat Perjanjian Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPKPAD Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPKPAD Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPKPAD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPKPAD Tahun 2023;


- b. merumuskan bahan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPKPAD Tahun 2023;
- c. melakukan koordinasi dalam untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPKPAD Tahun 2023 dengan unit kerja terkait; dan
- d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPKPAD Tahun 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Januari 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH


TRI WINARNO, SE MM u
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

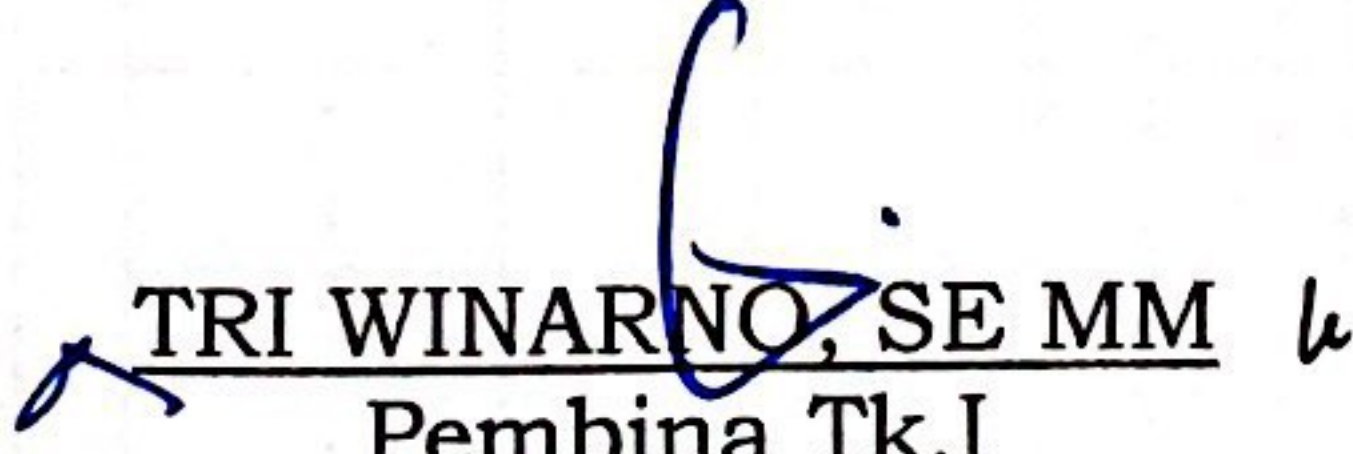
1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BPKPAD
NOMOR : 051.2/35 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
BPKPAD TAHUN 2022 DAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BPKPAD
TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HUSEIN TSANI UBADILLAH. SE MSI	SEKRETARIS	Ketua
2.	QOIDATUN NADHIROH SETIANINGSIH, MM	Ahli muda Perencanaan	Sekretaris
3.	DRA.DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.SI.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
4.	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	Kabid Penganggaran	Anggota
5	YUSI SUSANTI, SIP MM	Kabid Perbendaharaan	Anggota
6.	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
7.	KARTIKA SARI, ST, M.Eng	Kabid Perencanaan & Penetapan Pendapatan	Anggota
8.	FERRY WISNU CAHYO B, SE MM	Kabid Penagihan dan Pengendalian	Anggota
9.	NELY NIAMAH HANI, SIP MM	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
10	RAHMA ASITTA ZATIN, A.Md.Ak.	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

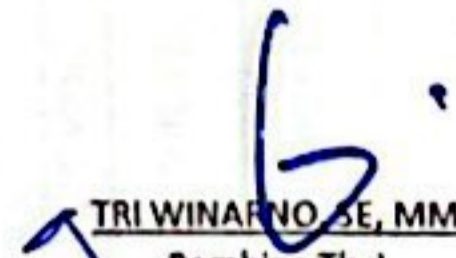
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH


TRI WINARNO, SE MM
Pembina Tk.I
NIP. 19731020 199903 1 005

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGLIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												RPT		
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4																						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5	6		7	8	9	11												12		
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					389.199.042.807																
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					2.500.000.000																
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota					7.997.804.000																
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.104.680.400,00																
						Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di			88,1	%																	
						Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja			99,1	%																	
						Pengelolaan BMD					1.104.680.400																
						Penyusunan Standar Harga			168	Unit Kerja	25.500.000																
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA		1	Aplikasi	Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA	989.180.400															
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok		104	Unit kerja	Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	90.000.000															
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																					
							Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak		1.27	%																	
							Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu		100	%																	
							Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu		100	%																	
							Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah		95	%																	
							Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		95	%																	
						Pengelolaan Pendapatan Daerah					645.625.400																
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD		2	Dokumen	Menyusun target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	326.718.200															
							Terlaksananya pendataan, pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah		600	OP/WP	Melaksanakan pendataan, pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah																
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	terlaksananya pelayanan pajak daerah		12	bulan	Melaksanakan pelayanan pajak daerah	257.180.400															
						Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah		12	Bulan	Melaksanakan penagihan pajak daerah	16.000.000															
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD		12	Bulan	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	45.726.800															
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					25.710.091.306																
							Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex DAUD)		100	%	Menyediakan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)																
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.682.391.306																
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS		14	bulan	Membayarkan gaji dan tunjangan PNS	24.682.391.306															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												RBT																					
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								11																																	
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
1	2	3				4		5		6		7		8		9		11												12																
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9 200 000																																	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya CCTV untuk kantor	8	unit	menyediakan CCTV untuk kantor			9 200 000																																	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah							186 500 000																																	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik	12	bulan	Menyediakan instalasi listrik			10 000 000																																	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan	Menyediakan Bahan Logistik Kantor			35 000 000																																	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	12	bulan	Menyediakan Barang cetak dan Penggandaan			13 500 000																																	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bulan	Melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu			78 000 000																																	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			50 000 000																																	
						Penyediaan jasa Urusan Penunjang Urusan Pemda							622 000 000																																	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	12	bulan	Melaksanakan jasa surat menyurat			2 000 000																																	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi,SDA dan listrik	12	bulan	Menyediakan Jasa Komunikasi,SDA dan listrik			230 000 000																																	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12	bulan	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum kantor			390 000 000																																	
						Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda							210 000 000																																	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	12	bulan	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan			85 000 000																																	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bulan	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50 000 000																																	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	Memelihara/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25 000 000																																	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50 000 000																																	

Temanggung, Februari 2023
KEPALA BPKPAD


TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

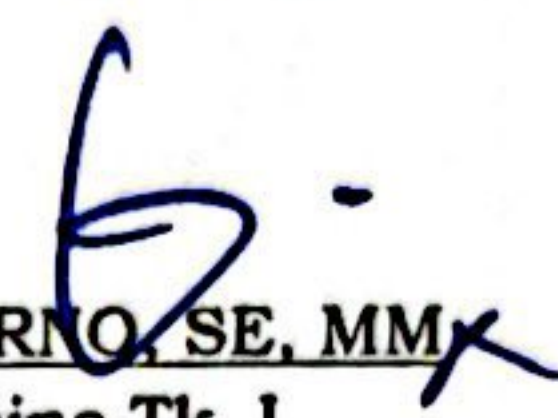
Rencana Kerja Tahunan BPKPAD Tahun 2024

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
1.	KEPALA	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP
			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah	%	15,5
2	SEKRETARIS	Terselenggaranya Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya pengelolaan Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	%	100
a	PERENCANA AHLI MUDA	Tersedianya pengelolaan Perencanaan dan jasa penunjang perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PD	Dokumen	27
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12
			Terlaksananya jasa surat menyurat	bulan	12
b	KASUBAG UMPEG	Tersedianya administrasi umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya instalasi listrik	bulan	12
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	bulan	12
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	bulan	12
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	bulan	12
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	bulan	12
			Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12
			Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12
c	KASUBAG KEUANGAN	Tersedianya administrasi keuangan dan jasa penunjang perangkat daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	bulan	14
			tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	bulan	12
			tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	bulan	12
3	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	8
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100
d	KASUBID PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN	Terlaksananya pengelolaan Data dan Penetapan Pajak	Terlaksananya pelayanan pajak daerah	bulan	12
			Tercetaknya DHKP SPPT PBB-P2	Desa/Kel	289
			Terlaksananya penetapan dan cetak permutakhiran data obyek dan subyek pajak PBB-P2	SPPT	12000
e	KASUBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah	Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	Pengelola PAD	23
			Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah	OP/WP	10000

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
4	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100
f	KASUBID PENAGIHAN	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	12
g	KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah Pajak daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Bulan	12
5	KABID ANGGARAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	91
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
h	KASUBID ADMINISTRASI ANGGARAN	Terlaksananya tata kelola administrasi anggaran	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS APBD, KUPA & PPAS Perubahan APBD	dokumen	4
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	kegiatan	4
i	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN	Terlaksananya tata kelola penyusunan anggaran	Terlaksananya penelitian RKA, RKPA & terlaksananya Verifikasi DPA & DPPA	Dokumen	2300
			Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung & Perbup tentang Penjabaran APBD	Dokumen	4
6	KABID PERBENDAHARAAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100
			Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100
j	KASUBID PELAYANAN BELANJA	Terlaksananya tata kelola pelayanan Belanja Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	Orang/ ASN	7450
			Terlaksananya pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Dokumen	7660
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Unit kerja	104
k	KASUBID KAS DAERAH	Terpenuhinya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Terlaksananya Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Unit kerja	104
7	KABID BMD	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	100
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	80
l	KASUBID PENATAUSAHAAN BMD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	720
			Terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah	Unit kerja	577
			Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	Unit kerja	577
			Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	Satuan Kerja	104
m	KASUBID PEMBERDAYAAN BMD	Terlaksananya Pemberdayaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	Unit kerja	104

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
			Tersusunnya Standar Harga	Unit Kerja	168
8	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	penyampaian LKPD yang tepat waktu	%	100
n	KASUBID PELAPORAN KEUANGAN	Terlaksananya pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya laporan keuangan daerah	Unit kerja	46
o	KASUBID AKUNTANSI	Terlaksananya Akuntansi Keuangan Daerah	Tersedianya laporan keuangan daerah	Dokumen	1
			Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	Unit kerja	46

Temanggung, Februari 2023
KEPALA BPKPAD


TRI WINARNO, SE, MMx
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2022

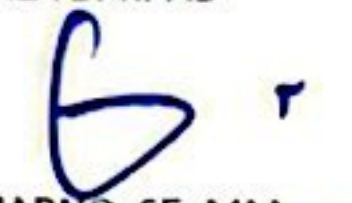
PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Indikator sasaran	Cara pengukuran indikator sasaran	Target	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Ket	Program	Pagu (Rp)	Tahun 2022		Tahun 2023		Ket		
						Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	Realisasi PAD dibagi realisasi pendapatan daerah	15	%	15,12	100	16,79	100	18,67	100	16,69	16,69												
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Klaster dan kategori nilai merupakan Interpretasi berdasar sistem IPKD oleh BPP Kemendagri, yang dihitung sesuai penilaian berdasar Permendagri no 19 tahun 2020.	79,5	%	Na		Na		Na		62,74	79,01												
	Program pengelolaan Keuangan daerah																	Program pengelolaan keuangan daerah	19.097.797.924	1.242.781.379	51,84				
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	Jumlah kegiatan di APBD yang sesuai RKPD dibagi jumlah kegiatan di APBD dikali 100%	100	%	97,83	100	96,49	100	99,76	100	99,77	99,77					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.174.250.000	428.951.102	69,38				
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	4 dimensi alokasi anggaran *20	89,96	%	100	100	100	100	100	100	100	100												
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang direncanakan	100	%	0,57	100	0,86	100	100	100	100	100												
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	Jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.128.267.924	347.958.616	47,49				
		Persentase realisasi keuangan	Realisasi belanja dibagi anggaran Belanja Daerah pada APBD	93	%	94,57	100	93,68	100	88,99	95,69	84,52	95,69					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.795.280.000	465.871.661	38,66				
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Jumlah perangkat yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi dengan jumlah perangkat daerah	90	%	95,74	100	85,1	94,556	89,13	99,03	78,83	99,03												
		Opini BPK atas LKPD	Penyajian sesuai SAP kepatuhan peraturan perundangan tingkat materialitas temuan sistem pengendalian internal	WTP	-	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100												
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.220.000.000	1.892.064.368	70,77			
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	Jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100%	88,1	%	80,95	91,884	81,55	92,565	84,52	95,94	84,52	97,92												
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.	99,1	%	98,54	99,435	78,75	79,465	78,83	79,55	78,83	79,7												
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.811.034.972	1.086.661.276	91,56			
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	rumus pertumbuhan obyek pajak adalah n-1 dibagi n dikali 100%	1,27	%	1,14	89,764	1,05	82,677	0,72	56,69	0,7	72,91												
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.	100	%								100	100												

No	Sasaran	Indikator sasaran	Cara pengukuran indikator sasaran	Target	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Ket	Program	Pagu (Rp)	Tahun 2022		Tahun 2023		Ket
						Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	Jumlah SKPD yang diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100										
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.	95	%	98,9	100	100	100	100	100	103,54	100										
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	Jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%	95	%	100	100	100	100	100	100	100	100										
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.528.270.000	15.061.309.424	77,47			
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		100	%	100	100	100	100	100	100	100	100										

Temanggung, Februari 2023

KEPALA BPKPAD



TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031000

Tabel 4.1 Pengukuran Perjanjian Kerja 2022

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022
1.	KEPALA	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	79,4
2	SEKTRETARIS	Terselenggaranya Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100
a	KASUBAG PERENCANAAN	Tersedianya pengelolaan Perencanaan dan jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PD	Dokumen	27
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	%	100
			Terlaksananya jasa surat menyurat	%	100
b	KASUBAG UMPEG	Tersedianya administrasi umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Terpenuhinya Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun dan Pelayanan Kepegawaian lainnya	bulan	12
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	bulan	12
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	bulan	12	
			Terpeliharanya / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12
		Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	
			Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12
		Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	
			Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12
			Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12
		c	KASUBAG KEUANGAN	Tersedianya administrasi keuangan dan jasa penunjang perangkat daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS
tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	bulan				12

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022
			tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	bulan	12
3	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak	%	100
			Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,96
			Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100
d	KASUBID PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN	Terlaksananya pengelolaan Data dan Penetapan Pajak	Terlaksananya penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	bulan	12
			Terlaksananya pelayanan pemutakhiran data Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah	bulan	12
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak daerah.	bulan	12
e	KASUBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah	Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	dokumen	2
			Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah	wp	600
4	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95
f	KASUBID PENAGIHAN	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah	Bulan	12
g	KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah Pajak daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Bulan	12
5	KABID ANGGARAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
h	KASUBID ADMINISTRASI ANGGARAN	Terlaksananya tata kelola administrasi anggaran	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS APBD, P KUA & P PPASAPBD	dokumen	4
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	kegiatan	4
			Terlaksananya penelitian RKA, P RKA & terlaksananya Verifikasi DPA & P DPA	Dokumen	2300

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022
i	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN	Terlaksananya Tata Kelola Penyusunan Anggaran	Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	4
6	KABID PERBENDAHARAAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat Waktu	%	100
j	KASUBID PELAYANAN BELANJA	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	dokumen	1.344
			Terlaksananya pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Dokumen	7.660
			Terlaksananya penerbitan SK Bupati	Dokumen	15
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Pegawai	Dokumen	8
			Tersedianya register SP2D dan daftar penguji	Dokumen	400
			Terlaksananya proses penerbitan SKPP	Dokumen	500
k	KASUBID KAS DAERAH	Terpenuhinya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Terlaksananya Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Dokumen	186
7	KABID BMD	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	86,31
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,9
l	KASUBID PENATAUSAHAAN BMD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	720
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA	Aplikasi	1
			Terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah	Unit kerja	577
			Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	Unit kerja	577
			Terlaksananya pembinaan pejabat/pembantu pejabat pengurus barang	Unit kerja	577
			Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	unit kerja	104
m	KASUBID PEMBERDAYAAN BMD	Terlaksananya Pemberdayaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa tanah selain eks bengkok dan/atau gedung serta pinjam pakai.	Unit Kerja	103
			Terlaksananya pemindahtanganan barang milik daerah berupa penjualan, tukar menukar dan hibah, serta penghapusan barang milik daerah	unit kerja	168

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022
			Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa tanah eks bengkok	satker	11
			Tersusunnya Standar Harga	unit kerja	103
8	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi keuangan	%	93,00%
			Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90,00%
			Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP
n	KASUBID PELAPORAN KEUANGAN	Terlaksananya pelaporan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulanan Pemerintah Daerah	Dokumen	8
			Tersedianya Laporan Keuangan Semester I Pemerintah Daerah	Dokumen	1
			Tersedianya informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Kemendagri, Kemenkeu, Provinsi, BPS, dan APH)	Dokumen	7
			Tersedianya laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	Dokumen	7
			Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2
o	KASUBID AKUNTANSI	Terlaksananya pelaporan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Tersedianya laporan keuangan Perangkat Daerah melalui e-keuangan akuntansi	Dokumen	103
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	Dokumen	103
			Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, asistensi, dan monitoring penyusunan laporan keuangan	Dokumen	103

Temanggung, Februari 2023

KEPALA BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031000